

PENDEKATAN KLASTER BISNIS UKM DAN RELEVANSINYA

Oleh : Imronah*)

Abstraksi

Hari ini kita mempunyai dimensi persoalan baru yang bukan semata-mata aspek kelembagaan yang lamban menyesuaikan dengan tantangan zaman, tetapi lingkungan dan peraturan perundangan telah berubah secara radikal, sehingga dapat menopang tuntutan untuk mempertahankan yang lama, apabila memperbaikinya. Belum sempat beranjak untuk mengadakan penyesuaian industri gula telah dihadapkan pada realitas "penyapihan" baru yaitu, keluarnya UU 23/1999 tentang Bank Indonesia yang membawa konsekwensi perubahan pola pembiayaan melalui kredit perbankan. Dalam proses transisi sekarang ini pola pembiayaan memang diatur, namun prinsip "prudent banking" dan kebiasaan petani tebu yang selalu terkait dengan kredit program masih menjadi celah tersendiri bagi tidak efektifnya kredit program yang ada.

Kata Kunci : Klaster Bisnis UKM dan Relevansi

A. Pendahuluan

Sejarah industri gula di Jawa sudah terlalu panjang dan melewati perjalanan berbagai rejim politik dan kekuasaan serta sistem pengaturan oleh negara. Namun sampai saat ini industri gula masih menempati tempat sensitive dalam dinamika pasar dan perubahan kebijakan serta proses transformasi struktural dibidang ekonomi dan kebudayaan sepanjang masa perjalanan industri gula yang telah mencapai usia ratusan tahun.

Persoalan di Jawa lebih menarik lagi, karena tebu rakyat yang semula bukan merupakan sub-sistem pendukung industri gula di Indonesia, sejak tahun 1975 mulai dikaitkan dengan sistem industri gula pasir. Sehingga sulitnya industri gula pasir berdampak kepada sakitnya pertanian tebu rakyat, padahal sebenarnya tidak demikian apabila kita mampu mendudukan secara profesional.

Oleh karena itu perspektif baru dalam melihat hari depan petani tebu rakyat perlu dirubah "paradigma" nya dari membangun industri gula menjadi membangun agrobisnis berbasis tebu rakyat. Pikiran untuk melihat berbagai bentuk alternatif dalam bidang kelembagaan, sistem budidaya, teknologi industri dan pembiayaan memang sangat mendesak untuk dikerjakan. Dalam kerangka ini salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pendekatan klaster agribisnis berbasis tebu, yang merupakan cara pandang dengan mendasarkan pengembangan industri agar menjamin kelangsungan pusat-pusat pertanian tebu rakyat dalam rangka agroindustri yang dinamis dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani tebu dan menjamin daya saing usaha tani tebu rakyat.

B. Pembahasan

1. Aspek Administratif dan Lingkungan Usaha

Dalam hal aspek administratif dan lingkungan usaha tani tebu paling tidak ada 4 (empat) hal penting yang perlu diperhatikan :

- a. Sesuai dengan UU No.12/1992 tentang Budidaya Tanaman, kedudukan petani adalah bebas untuk mengusahakan tanaman yang ditanam sesuai dengan pilihannya, sehingga pada dasarnya tidak ada alokasi lahan untuk tanaman tertentu. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai program untuk mewajibkan petani menanam tanaman tertentu, maka petani harus dijamin untuk diusahakan agar pendapatan yang diperolehnya tidak lebih rendah.
- b. Dalam UU 7/1996 tentang pangan, kedudukan bahan pangan adalah barang perdagangan sehingga konsekwensinya harus diperlakukan sebagai barang perdagangan biasa. Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan organisasi perdagangan dunia yang telah diantisipasi oleh Indonesia. Meskipun dalam perundingan tersebut Indonesia menempatkan "bound rate" yang tinggi karena tarif yang diterapkan secara nyata rendah menjadi kesulitan memanfaatkan peluang tersebut. Hal ini selain dibatasi oleh kebutuhan kita untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri juga kesulitan mengadakan negoisasi dalam kerangka perundingan bilateral atau multilateral lainnya diluar WTO, seperti IMF dan lain-lain.
- c. UU 23/1999 tentang Bank Indonesia yang diperkuat persetujuan DPR pada tanggal 23 Desember 1999 tentang perlunya kredit program bagi pertanian dilaksanakan kembali ke pola "executing" bahkan menjadi executing penuh,

meskipun demikian pada saat ini masih diijinkan untuk memberikan subsidi bunga yang diperkirakan dapat berlangsung sampai tiga tahun mendatang. Perubahan sistem tata niaga dan perkreditan tidak menjadikan gula komoditi yang terlalu menarik untuk dibiayai perbankan karena tidak sistem tertutupi lagi, sehingga resiko bagi bank akan pengembalian kredit menjadi lebih besar lagi.

- d. Adanya otonomi daerah menjadikan pemaduan alokasi bagi kepentingan pabrik dan kepentingan daerah dapat berbeda. Oleh karena itu posisi industri gula pasir di Jawa menjadi kurang menguntungkan lagi. Apabila jika dikaitkan dengan keinginan daerah penanam tebu untuk mendapatkan nilai tambah setinggi mungkin ditempat masing-masing, maka akan menyulitkan pabrik gula mengalokasikan sistem insentif.

Dengan keempat hal tersebut pengembangan agrobisnis tebu, harus kompartibel dengan prinsip : (i) menghasilkan pendapatan terbaik sesuai ongkos alternatif dari lahan, (ii) Mempunyai daya saing secara global, (iii) dengan dukungan pembiayaan komersial dan, (iv) dapat menampung aspirasi kepentingan daerah otonom.

Dengan gambaran perubahan diatas posisi usaha tani tebu rakyat di pulau Jawa tanpa intervensi akan sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Pada dasarnya responds petani tebu rakyat terhadap harga

gula dalam jangka pendek sangat rendah (Soetrisno, 1984), sehingga faktor yang paling menentukan pilihan menanam tebu adalah ongkos alternatif (opportunity cost) lahan. Sehingga tebu rakyat ketika itu hanya tumbuh pesat di daerah tebu rakyat tradisional seperti di Malang, Kediri, Tulungagung, Madiun, Solo, Kendari, Cirebon. Dengan demikian ke depan "mapping" atau pemetaan lahan tebu rakyat menjadi penting untuk menyusun strategi alokasi bahan baku bagi industri yang ada maupun industri yang akan tumbuh.

Berbagai studi terdahulu (DGI, 1988) menemukan bahwa daya dukung potensial tanaman tebu rakyat di Jawa tanpa intervensi seperti sekarang ini akan tinggal sekitar 120.000-170.000 hektar saja, atau hanya mampu mendukung 20 pabrik gula dengan kapasitas sekitar \pm 4.000 ton tebu/hari, untuk itu 165 hari giling/tahun. Dengan demikian secara komersial dengan ongkos alternatif lahan yang semakin tinggi kita tidak mungkin mempertahankan industri gula di Jawa tanpa mengorbankan rakyat untuk mendapatkan peluang meningkatkan pendapatan yang lebih baik di luar tebu. Dalam sejarah pergulaan di Jawa, tercatat pada tahun 1935 hasil gula/hektar di Indonesia pernah mencatat rekor terbesar selama puluhan tahun, namun ketika itu hanya 35 buah pabrik gula yang melakukan giling. Jika kita ingin meningkatkan daya saing dengan perbaikan produktifitas maka Instrumen utamanya akan tetap dengan mengurangi jumlah pabrik gula yang ada di Jawa.

Sehubungan dengan kecenderungan diatas, maka pengembangan agribisnis berbasis tebu rakyat memiliki

peluang baru yang tidak selalu menjadi bagian dari sistem industri gula di Jawa. Jika kecenderungan ini dapat diterima, maka agenda terpenting adalah penyelamatan bagi petani perkebunan tebu rakyat yang secara lokasi tidak lagi kompetitif mengaitkan dengan pabrik gula yang masih akan ada, namun mereka harus hidup karena tebu adalah tanaman yang relatif kompetitif dan secara internal dikuasai dengan baik oleh mereka.

2. Klaster Bisnis Agro Industri Berbasis Tebu

Pendekatan klaster yang mempunyai ciri pusat pertumbuhan industri sejenis yang mempunyai kaitan kedepan dan kebelakang dengan baik merupakan modal untuk membangun pelaku bisnis kecil di kawasan atau sentra di maksud. Dalam kerangka itu penguatan sumberdaya UKM pada dasarnya dapat dilakukan melalui sentra-sentra. Prinsip yang akan dikembangkan adalah menciptakan dinamika klaster dengan memainkan instrumen dukungan finansial dan non finansial. Dukungan finansial penting tetapi bukan segalanya, oleh karena sentra-sentra tersebut menjadi sangat penting, sentra-sentra tebu rakyat ini dapat memanfaatkan kawasan atau sentra yang telah dikembangkan selama ini.

Secara garis besar pada sentra-sentra tebu rakyat yang arealnya relatif stabil dari waktu ke waktu dan di luar jangkauan kapasitas pabrik gula yang ada atau mengalami kelebihan pasokan bahan baku dapat dikembangkan pengolahan tebu skala kecil yang menjadi pengolahan antara bagi pabrik gula atau industri pengguna langsung lainnya. Dalam hal ini juga perlu

dijajaki kemungkinan pengembangan industri pemurnian gula cair sebagai produk potensial bagi pasar gula di sektor industri makanan dan minuman serta hotel dan restoran. Pendekatan pengembangan klaster yang dinamis pada dasarnya adalah menjaga dinamika klaster agar tumbuh menjadi pusat pertumbuhan yang melahirkan industri terkait baik hulu maupun di hilir atau pendukung maupun out let. Untuk menjamin dinamika tersebut, diperlukan dua macam dukungan yaitu yang bersifat non-finansial maupun yang bersifat finansial.

Dukungan non-finansial menjadi sangat penting untuk menjamin dinamika klaster, oleh karena itu setiap sentra seharusnya tersedia layanan pengembangan bisnis bagi pekebun, pengolah dan pelaku usaha kegiatan terkait. Layanan pengembangan bisnis tersebut meliputi konsultasi manajemen, pengembangan teknologi dan jaringan pasar, serta pelatihan. LPB juga berperan untuk mendorong kelancaran penyediaan input dan pemasaran dengan memfasilitasi hubungan dengan para pemasok dan pelaku pemasaran. Fungsi penyedia jasa pengembangan agrobisnis ini juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah seperti balai pelatihan dan lain-lain, tetapi yang terpenting harus ada kontak di kawasan dimaksud. Kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh koperasi para petani tebu di kawasan tersebut atau kantor pelayanan koperasi.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan usaha di kawasan sentra-sentra memang ideal apabila tersedia lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan usaha yang sifatnya khusus dan fleksibel sesuai kebutuhan

pengusaha setempat. Pada daerah semacam ini pengalaman keberhasilan lembaga keuangan harus sesuai dengan kondisi pasar setempat dan tingkat persaingannya. Secara garis besar sebenarnya ada mekanisme fungsional dalam pembagian pasar yang dapat dilihat dari segi penyedia kredit dan pengguna dana. Dalam Perkreditan mikro di kawasan sentra-sentra dapat dikerjakan oleh koperasi simpan pinjam, BPR maupun kantor cabang pembantu/unit desa dari bank-bank komersial. Dengan demikian pembiayaan akan terjamin tersedia langsung di pusat sentra.

Peranan pembiayaan dari pasar modal dapat menjadi penyedia likuiditas bagi KSP/BPR yang berada di sentra-sentra, dengan demikian gagasan untuk menjadikan "agribisnis tebu rakyat" masuk ke dalam pasar modal juga akan mendukung pembiayaan usaha tani melalui koperasi simpan pinjam. Jika sinergi ini terjadi maka dinamika dari klaster agribisnis tebu rakyat akan dapat bergerak cepat. Dalam hal ini berbagai industri yang memanfaatkan produk dari tebu dapat ikut dikembangkan. Pembiayaan dari pasar modal juga memungkinkan tersedianya investasi baru disektor pengolahan untuk mengembangkan produk-produk baru dari tebu selain gula pasir. Dengan cara demikian agribisnis tebu dapat menjadi prioritas bagi tumbuhnya industri makanan dan minuman di pedesaan.

C. Penutup

Pengembangan agribisnis tebu rakyat di Jawa harus menekankan pada orientasi misi untuk memanfaatkan peluang lebar dari pengembangan produk dari tebu. Pendekatan klaster agrobisnis tebu rakyat dapat

diperkenalkan dan gagasan untuk mengkaitkan dengan sumber dana dari pasar modal adalah strategi tepat untuk membuat agrobisnis tebu rakyat secara komersial yang layak.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) ; Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah dan Ekspor Usaha Kecil dan Menengah, BPS, Jakarta, September 2001;
- Badan Pusat Statistik (BPS) ; Pengukuran Perkembangan Modal Tetap Bruto (Investasi) Usaha Kecil Menengah, BPS-BPSKPKM,, Jakarta, Indonesia, Oktober 2001;
- Noer Soetrisno; Science and Technology Policy and Strategy For Establishing ST Business Program : The Indonesia's SME Perspective, The International Journal of IIFTIHAR, January 2001;
- Shunjiro Urata; Policy Recommendation for SME Promotion in The Republic of Indonesia, Report of Study team under JICA program, July 2000.
- Tulus Tambunan T.H, Dr ; Kinerja Ekspor Manufaktur Indonesia, Kompartemen Industri Logam Dasar & Mesin dan LP3E Kadin Indonesia, Jakarta, Indonesia 2001.